

Pengaruh Pandemi Covid - 19 dan Kebijakan Pemerintah Terhadap *Occupancy Rate* Kamar Hotel

*The Influence of the Covid - 19 Pandemic and Government Policy on Hotel Room
Occupancy Rates*

61

Sri Endah Yuwantiningrum

*Program Studi Sarjana Pariwisata, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor, Jawa
Barat, Indonesia*

EMail: BogorHM@favehotels.com

**Submitted:
JANUARI 2023**

**Accepted:
JUNI 2023**

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has dealt a heavy blow to the tourism sector. Restrictions on travel and in-person meetings have caused the transportation and lodging accommodation sector to drop drastically. Several policies, regulations and requirements for traveling are also obstacles for the hotel industry to be able to receive guests. An increase in the number of Covid-19 sufferers in an area will be followed by restrictions on travel regulations and policies, which will not only impact the local community, but also other residents who want to come or cross the area. These conditions directly affect the occupancy rate of hotel rooms in an area. This study used a secondary research method based on existing data. Sources of data come from daily and weekly reports on the occupancy rate of hotel rooms in the city of Bogor, as well as data obtained from other sources. The purpose of this study is to serve as a dashboard for future policy makers, especially on the impact of a policy on the occupancy rate of hotel rooms.

Keywords: *Pandemic, Room Occupancy Rate, Government Policy*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan pukulan keras bagi sektor pariwisata. Pembatasan perjalanan dan pertemuan secara langsung telah menyebabkan sektor transportasi dan akomodasi penginapan turun drastic. Beberapa kebijakan, peraturan serta persyaratan untuk bepergian juga menjadi kendala bagi industry hotel untuk bisa menerima tamu. Peningkatan jumlah penderita covid-19 di suatu wilayah akan diikuti adanya peraturan dan kebijakan pengetatan bepergian, yang bukan saja berdampak pada masyarakat setempat, namun juga bagi warga lain yang hendak datang maupun melintasi wilayah tersebut. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap tingkat keterisian kamar hotel (*occupancy rate*) di suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder yang bersumber pada data yang telah ada. Sumber data berasal dari laporan harian dan mingguan tentang tingkat keterisian kamar hotel di Kota Bogor, serta data yang didapat dari sumber lain. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai *dashboard* bagi pengambil kebijakan di masa mendatang, terutama atas dampak suatu kebijakan terhadap tingkat keterisian kamar hotel.

Kata Kunci: Pandemi, Tingkat Keterisian Kamar, Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara dan wilayah di seluruh dunia terkena dampak penyakit COVID-19. Pada akhir tahun 2021, virus ini kembali beredar dengan tingkat yang sangat tinggi, bahkan di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang relatif tinggi seperti Amerika Serikat dan Jerman. Ketika tingkat infeksi baru meningkat, beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Austria, kembali memperketat pembatasan, khususnya menargetkan mereka yang belum divaksinasi. Namun, pada musim semi 2022, tingkat infeksi baru telah menurun di banyak negara dan pembatasan kembali dicabut. Indonesia sendiri

JIPKES

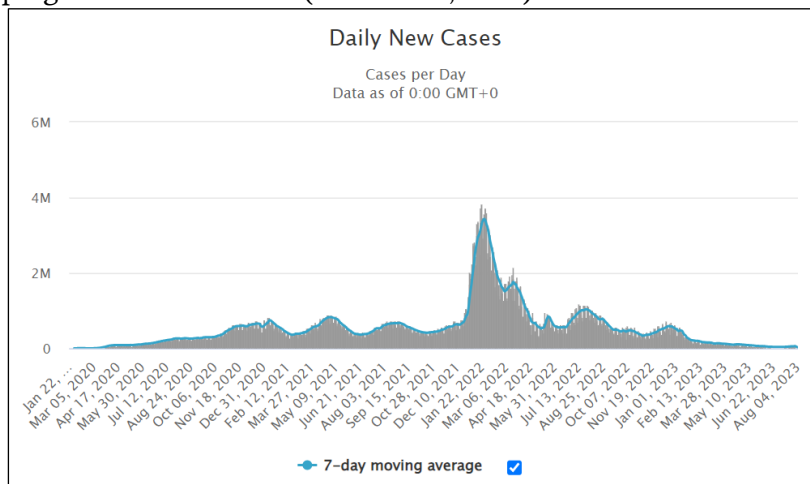
Jurnal Ilmiah Pariwisata
Kesatuan
Vol. 4 No. 2, 2023
pp. 61-70
IBI KESATUAN
E-ISSN 2745 – 7524
DOI: 10.374/jipkes.v3i2.2060

masuk berada pada peringkat ke-20 untuk jumlah kasus tertinggi di dunia. Menurut data dari *Worldmeter*, beberapa negara dengan jumlah kasus tertinggi antara lain: (1) Amerika Serikat, (2) India, (3) Perancis, (4) Jerman, (5) Brazil, (6) Korea Selatan, (7) Jepang, (8) Itali, (9) Inggris, dan (10) Rusia. Negara Indonesia sendiri berada di peringkat ke-20 untuk negara dengan kasus penderita Covid-19 terbanyak.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi utama dunia. Ini adalah kategori ekspor terbesar ketiga (setelah bahan bakar dan bahan kimia) dan pada 2019 menyumbang 7% dari perdagangan global. Untuk beberapa negara, ini dapat mewakili lebih dari 20% dari PDB mereka dan, secara keseluruhan, ini adalah sektor ekspor terbesar ketiga dalam ekonomi global. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi Covid-19, berdampak pada ekonomi, mata pencaharian, layanan publik, dan peluang di semua benua. Semua bagian dari rantai nilainya yang luas telah terpengaruh (UNWTO, 2021). Wabah pandemi novel coronavirus (COVID-19) baru-baru ini telah mengunci dan melemahkan ekonomi dunia dengan efek langsung. Antara lain, bisnis terkait pariwisata seperti bisnis makanan dan minuman, perjalanan dan hotel paling terpengaruh (Liew, 2020).

Di Indonesia, virus corona telah menginfeksi lebih dari satu juta orang sejak kasus pertama terkonfirmasi pada Maret 2020 dan puluhan ribu orang meninggal dunia. Pembatasan akibat virus corona terhadap perekonomian dan masyarakat terus memberikan dampak yang mengejutkan terhadap pembangunan manusia. Setelah kemajuan selama bertahun-tahun, kemiskinan kembali meningkat. Satu dari sepuluh orang di Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kemiskinan anak mungkin meningkat secara signifikan. Dampak sosialnya akan jauh lebih buruk jika bukan karena bantuan pemerintah.

Menyikapi krisis tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan paket stimulus fiskal secara besar-besaran melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia berada di peringkat lima besar negara di kawasan Asia Pasifik dalam hal jumlah total dana yang dikerahkan untuk memerangi COVID-19 (ADB, 2021). Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk program ini. Dengan masih berlangsungnya krisis, pemerintah mengumumkan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) pada bulan Februari 2021 untuk kelanjutan program PEN tahun ini (Kemenkeu, 2021).



Sumber: Statista

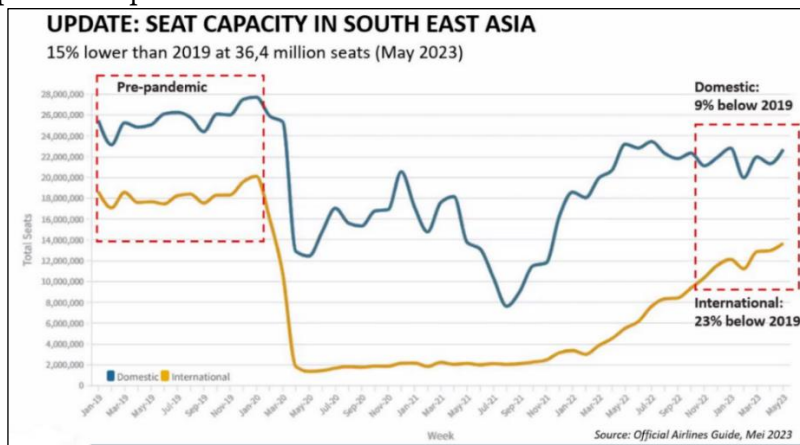
Gambar 1. Jumlah Penderita Covid-19 harian di Dunia (Jan 2020 - Aug 2023)

Pendapatan ekspor dari pariwisata dapat turun sebesar \$910 miliar menjadi \$1,2 triliun pada tahun 2020. Hal ini akan berdampak lebih luas dan dapat menurunkan PDB global sebesar 1,5% hingga 2,8%. Pariwisata mendukung satu dari 10 pekerjaan dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan lainnya baik di negara berkembang maupun negara maju. Di beberapa Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS), pariwisata menyumbang sebanyak 80% dari ekspor, sementara itu juga merupakan bagian penting dari ekonomi nasional baik di negara maju maupun berkembang (UNWTO, 2021).

Memahami tingkat dampak potensial dan saluran transmisi global akan membantu memprediksi sejauh mana dampak epidemi saat ini dan masa depan pada industri perjalanan dan pariwisata (Skare *et al*, 2021)

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting sebagai sumber devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak Maret 2020, pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, dan kurva infeksi kumulatif tidak melandai, dan terus meningkat secara eksponensial hingga saat ini. Fenomena tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau menciptakan pertumbuhan ekonomi yang negatif, serta menciptakan kondisi yang sangat buruk bagi sektor pariwisata di Indonesia (Purba *et al*, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pariwisata dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pandemi COVID-19 juga telah berdampak signifikan pada industri penerbangan karena pembatasan perjalanan dan berkurangnya permintaan di kalangan wisatawan. Penurunan jumlah penumpang secara signifikan telah mengakibatkan pembatalan penerbangan atau pesawat terbang kosong antar bandara, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan maskapai penerbangan secara besar-besaran dan memaksa banyak maskapai penerbangan untuk memberhentikan karyawannya atau menyatakan bangkrut. Beberapa pihak telah berusaha menghindari pengembalian dana perjalanan yang dibatalkan untuk mengurangi kerugian mereka. Produsen pesawat dan operator bandara juga memberhentikan karyawannya. Sektor penerbangan mencatat penurunan pergerakan penerbangan sebesar 80% di seluruh wilayah geografis, termasuk Amerika, Eropa, Asia-Pasifik, dan Timur Tengah per 4 Mei 2020. Banyak penerbangan dari Hong Kong yang dibatalkan pada Maret 2020 karena pandemi ini. Pada awal bulan Maret 2020 terdapat 10% dari seluruh penerbangan dibatalkan dibandingkan tahun 2019. Seiring dengan berkembangnya pandemi ini, terjadi penurunan pergerakan penerbangan sebesar 40–60% pada akhir bulan Maret dan penerbangan internasional merupakan bagian yang paling terkena dampaknya. Pada bulan April 2020, lebih dari 80% pergerakan penerbangan dibatasi di seluruh wilayah. Perkembangan Kapasitas Kursi di Asia Tenggara dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Statista

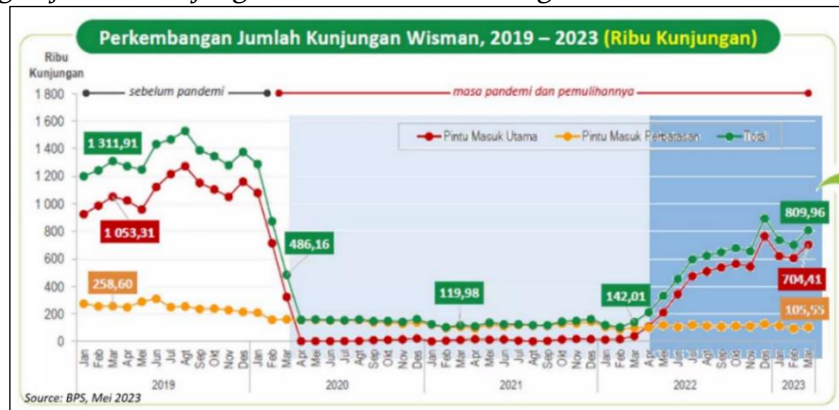
Gambar 2. Perkembangan Kapasitas Kursi di Asia Tenggara (Januari 2019 – Mei 2023)

Badan penerbangan sipil PBB telah mengkonfirmasi bahwa lalu lintas penumpang internasional mengalami penurunan drastis sebesar 60 persen pada tahun 2020, sehingga total perjalanan udara kembali ke tingkat tahun 2003. *The International Civil Aviation Organization (ICAO)* melaporkan bahwa ketika kapasitas kursi turun sebesar 50 persen pada tahun lalu, jumlah penumpang turun sebesar 60 persen dengan hanya 1,8 miliar penumpang yang terbang pada tahun pertama pandemi ini, dibandingkan dengan 4,5 miliar pada tahun 2019. Angka-angka tersebut juga menunjukkan kerugian finansial bagi maskapai penerbangan sebesar 370 miliar dolar akibat dampak COVID-19, sedangkan bandara dan penyedia layanan navigasi udara (ANSP) masing-masing mengalami

kerugian sebesar 115 miliar dan 13 miliar dolar.

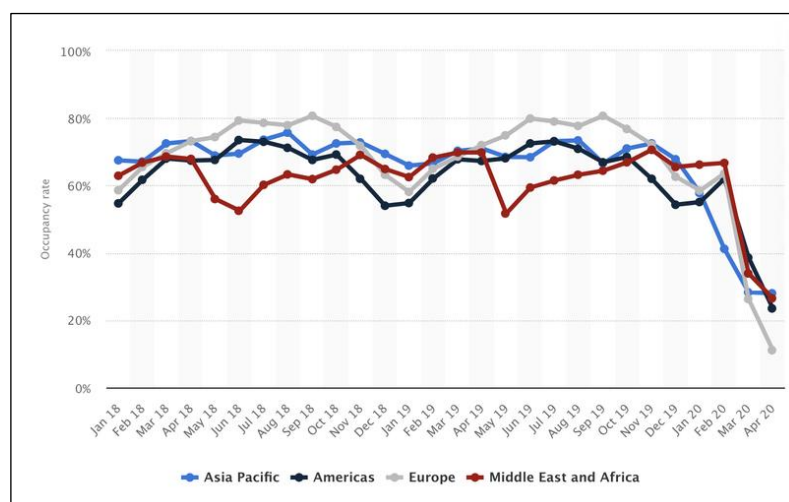
Penurunan permintaan perjalanan udara akibat pandemi ini dimulai pada bulan Januari 2020, namun hanya terjadi di beberapa negara saja. Namun, ketika virus ini terus menyebar secara global, aktivitas transportasi udara terhenti pada akhir bulan Maret. Dengan diberlakukannya tindakan *lockdown* berskala besar, penutupan perbatasan, dan pembatasan perjalanan di seluruh dunia, pada bulan April jumlah penumpang secara keseluruhan telah turun 92 persen dari tingkat tahun 2019, rata-rata penurunan sebesar 98 persen yang terjadi di penerbangan internasional. lalu lintas dan 87 persen turun pada perjalanan udara domestik.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia, dampak dari menurunnya jumlah penerbangan baik internasional maupun domestic telah juga menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestic. Data BPS menggambarkan bahwa penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dimulai pada Bulan Januari 2020 hingga April 2020. Bulan-bulan setelah April 2020 mengalami stagnasi di level bawah untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan mulai terjadi kenaikan lagi pada Bulan April 2022. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa selama 2 tahun Pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berada di level bawah. Gambar 3 menunjukkan tentang perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2019 – 2023.



Sumber: BPS, Mei 2021

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari tahun 2019 – Maret 2023



Sumber: Statista

Gambar 4. Perkembangan Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) di Dunia (Januari 2018 – April 2020)

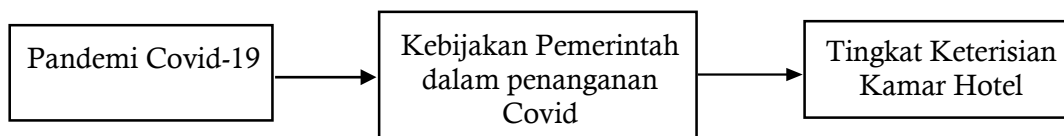
Kombinasi *lockdown* lokal dan pembatasan perjalanan mengakibatkan banyak hotel harus tutup sementara atau beroperasi dengan kapasitas yang terbatas. Ketika krisis ini

terus berkembang, masih belum jelas bagaimana bentuk industri ini nantinya. Industri perhotelan terbiasa menghadapi gangguan, namun tidak pernah sebesar ini. Meskipun sebelumnya hanya peristiwa lokal seperti badai yang dapat mengakibatkan penutupan jangka panjang, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelanggan yang ingin menginap di hotel. Apa yang membuat krisis ini begitu unik adalah betapa tidak pandang bulunya krisis ini, hal ini terbukti dengan setiap bisnis hotel dan seluruh penjuru dunia telah terkena dampaknya dengan berbagai cara.

Gambar 4 di atas terlihat bahwa sejak Bulan Januari 2018 hingga Desember 2020 tingkat keterisian kamar hotel masih pada taraf yang stabil dengan rentang 50% hingga 80%. Kondisi yang sangat berbeda pada Bulan Januari 2020 hingga April 2020, dimana terjadi penurunan yang drastic untuk tingkat keterisian kamar hotel di dunia, baik di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Australia maupun Asia Pasifik. Bahkan, pada April 2020, tingkat keterisian kamar hotel jatuh hingga sekitar 20% dan dibawah 20%. Kondisi tersebut berlarut hingga tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder, yaitu metode yang menggunakan data sekunder. Data didapatkan dari berbagai sumber terpercaya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian sekunder, juga dikenal sebagai penelitian pustaka, adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang ada yang bersumber dari berbagai saluran. Penelitian sekunder melibatkan ringkasan, penyusunan dan/atau sintesis penelitian yang sudah ada. Penelitian sekunder berbeda dengan penelitian primer karena penelitian primer melibatkan pengumpulan data, sedangkan penelitian sekunder menggunakan sumber penelitian primer sebagai sumber data untuk dianalisis.



Gambar 5 : Kerangka Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari organisasi maupun institusi yang terpercaya, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun organisasi internasional. Data yang didapat dari dalam negeri antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS Jawa Barat, *Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA)* Bogor. Sedangkan data atau informasi yang berasal dari lembaga internasional didapatkan dari *Statista* dan *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pandemic covid selama tahun 2020 hingga 2021 merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan tersebut di satu sisi berdampak negatif terhadap Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*), namun merupakan pilihan terbaik supaya wabah virus Covid-19 tidak menyebar lebih luas. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang diartikan sebagai "Membatasi aktivitas tertentu penduduk pada suatu wilayah yang diduga tertular suatu penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi." PSBB merupakan salah satu jenis penerapan kekarantinaan kesehatan di suatu wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit darurat kesehatan masyarakat yang terjadi antar masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan paling sedikit

mencakup penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan penanggulangan wabah Covid-19 melalui Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

No	Nama Kebijakan	Tahun	Dasar Peraturan	Aturan yang diterapkan
1	Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)	2020	PP Nomor 21 Tahun 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)
2		2020	Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020	PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran

Setelah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Tabel 2 di bawah menunjukkan kebijakan, tahapan, waktu pelaksanaan, dasar peraturan serta jangkauan wilayah dari implementasi PPKM di beberapa wilayah di Indonesia.

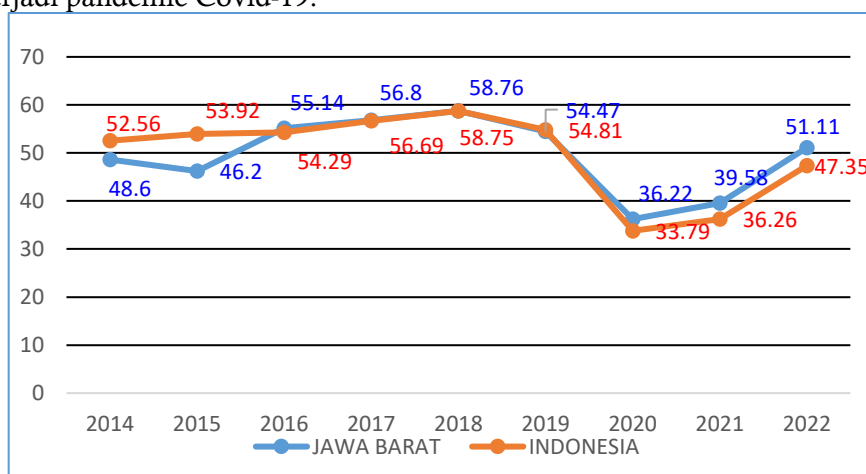
Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan penanggulangan wabah Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kebijakan	Tahap	Mulai	Hingga	Dasar Peraturan	Wilayah
PPKM	I	11 Jan 2021	25 Jan 2021	Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021	P. Jawa dan Bali
	II	26 Jan 2021	8 Feb 2021	Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021	P. Jawa dan Bali
PPKM mikro	I	9 Feb 2021	22 Feb 2021	Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021	P. Jawa dan Bali
	II	23 Feb 2021	8 Mar 2021	Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021	P. Jawa dan Bali
	III	9 Mar 2021	22 Mar 2021	Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2021	10 provinsi (tambahan: <u>Sumatra Utara</u> , <u>Kalimantan Timur</u> , <u>Sulawesi Selatan</u>)
	IV	23 Mar 2021	5 Apr 2021	Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021	15 provinsi (tambahan: <u>Sulawesi Utara</u> , <u>Kalimantan Selatan</u> , <u>Kalimantan Tengah</u> , <u>Nusa Tenggara Barat</u> , <u>Nusa Tenggara Timur</u>)
	V	6 Apr 2021	19 Apr 2021	Instruksi Mendagri No. 7 Tahun 2021	20 provinsi (tambahan: <u>Kalimantan Utara</u> , <u>Aceh</u> , <u>Sumatra Selatan</u> , <u>Riau</u> , <u>Papua</u>)
	VI	20 Apr 2021	3 Mei 2021	Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021	25 provinsi (tambahan: <u>Sumatra Barat</u> , <u>Jambi</u> , <u>Lampung</u> , <u>Kalimantan Barat</u> , <u>Kepulauan Bangka Belitung</u>)
	VII	4 Mei 2021	17 Mei 2021	Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021	30 provinsi (tambahan: <u>Kepulauan Riau</u> , <u>Bengkulu</u> , <u>Sulawesi Tengah</u> , <u>Sulawesi Tenggara</u> , <u>Papua Barat</u>)
	VIII	18 Mei 2021	31 Mei 2021	Instruksi Mendagri No. 11 Tahun 2021	30 provinsi
	IX	1 Jun 2021	14 Jun 2021	Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021	Nasional (tambahan: <u>Gorontalo</u> , <u>Maluku</u> , <u>Maluku Utara</u> , <u>Sulawesi Barat</u>)
	X	15 Jun 2021	28 Jun 2021	Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021	Nasional
	XI	22 Jun 2021	5 Jul 2021	Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021	Nasional
	XII	6 Jul 2021	20 Jul 2021	Instruksi Mendagri No. 17 dan No. 20 Tahun 2021	Nasional
—	21 Jul 2021	25 Jul 2021	Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021	Nasional	
PPKM	—	3 Jul 2021	20 Jul 2021	Instruksi Mendagri	P. Jawa dan Bali

darurat	—	12 Jul 2021	20 Jul 2021	No. 15, No. 16, No. 18, dan No. 19 Tahun 2021	15 wilayah luar Jawa-Bali
PPKM level 1-4	—	21 Jul 2021	25 Jul 2021	Instruksi Mendagri No. 22 dan No. 23 Tahun 2021	Sejumlah provinsi
	—	26 Jul 2021	2 Agt 2021		Sejumlah provinsi

Sumber: Wikipedia

Kebijakan dalam rangka mengendalikan wabah Covid-19 di atas secara langsung maupun berpengaruh terhadap Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*). Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) dibagi menjadi 2 bila dilihat dari Jenis Bintang Hotelnya, antara lain adalah: (1) Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Bintang, dan (2) (1) Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Non-Bintang. Bila dirata-rata, Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) untuk Hotel Bintang di Provinsi Jawa Barat mirip dengan Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) Hotel Bintang di Indonesia (secara Nasional). Rentang Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) Hotel Bintang Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2014 hingga 2019 (sebelum Pandemi Covid-19) antara 46,2% hingga 58,76%. Kondisi tingkat keterisian kamar hotel berbintang pada tahun 2020 saat terjadi pandemic covid turun menjadi sekitar 33% hingga 36%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan membaik yang bahkan tahun 2022 berangsur-angsur Kembali seperti saat belum terjadi pandemic Covid-19.

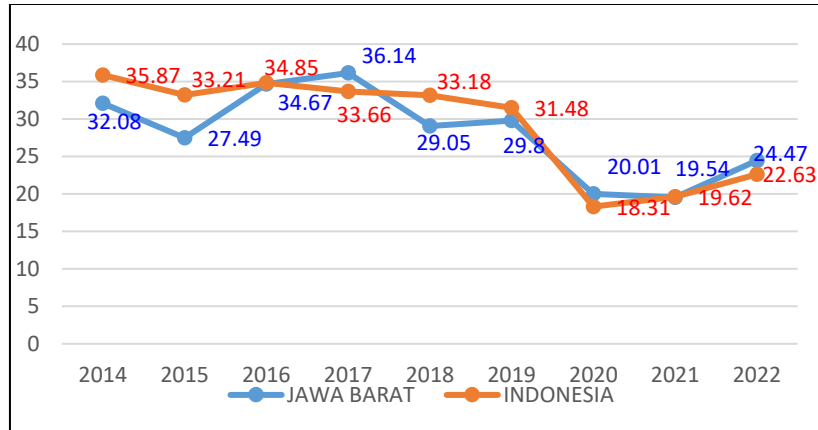


Sumber: BPS Indonesia

Gambar 6. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Bintang (persen) di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia

Secara nasional maupun secara Provinsi Jawa Barat, terjadi perbedaan dalam tingkat keterisian kamar hotel antara Hotel Bintang dengan Hotel Non-Bintang. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Non Bintang di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 sebelum terjadi Pandemi Covid-19 dengan rentang 27,49% hingga 36,14%. Kemudian turun menjadi rentang 18,31% hingga 20,01% pada saat terjadi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Non Bintang di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kenaikan. Namun berbeda dengan Hotel Bintang yang kenaikan pada tahun 2022 sudah menyerupai kondisi sebelum pandemic Covid, untuk Hotel Non-Bintang masih di bawah sebelum pandemic, yaitu dengan rentang 22,63% hingga 24,47%. Hal ini kemungkinan karena para pengunjung hotel lebih memilih hotel berbintang yang dirasa lebih tertib dan disiplin dalam menerapkan protocol Kesehatan di hotelnya. Kemungkinan yang lain adalah adanya kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih setelah pandemic. Akibatnya, pengunjung yang melakukan perjalanan wisata yang dilanjutkan dengan menginap di hotel merupakan pengunjung yang dengan kemampuan ekonomi lebih baik (kelompok atas dan menengah). Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Non Bintang (persen) di Provinsi

Jawa Barat dan Indonesia ada di Gambar 7 di bawah ini.

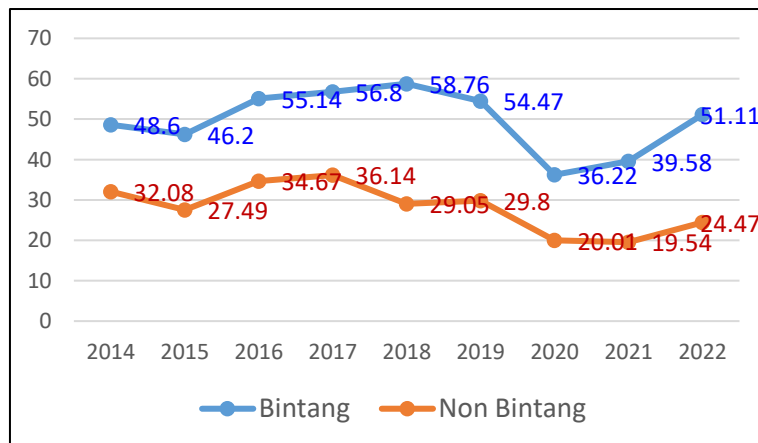


Sumber: BPS Indonesia

Gambar 7. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Non Bintang (persen) di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia

Penjelasan di atas juga didukung dengan gambar tentang perbandingan antara tingkat keterisian kamar hotel (*occupancy rate*) pada hotel bintang dan non bintang di Provinsi Jawa Barat terlihat bahwa tingkat keterisian di kamar hotel berbintang selalu di atas hotel non-bintang. Data tingkat keterisian kamar hotel di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 hingga 2022 dari BPS menunjukkan bahwa tingkat keterisian Hotel Bintang lebih tinggi dibandingkan Hotel Non Bintang. Bila dilihat rentangnya, tingkat keterisian Hotel Bintang dari 2014 hingga 2022 antara 36,22% hingga 58,76%. Sedangkan tingkat keterisian Hotel Non Bintang dari tahun 2014 hingga 2022 berada pada rentang 19,54% hingga tertinggi 36,14%.

Selain membandingkan tingkat keterisian kamar hotel dengan tipe hotel yang sama, yaitu hotel Bintang dan hotel Non-Bintang, perlu juga membandingkan tingkat keterisian antara hotel Bintang dan hotel non Bintang pada wilayah yang sama, misalnya Provinsi Jawa Barat atau Indonesia. Gambar 8 di bawah menjelaskan tentang Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Bintang dan Non Bintang (persen) di Provinsi Jawa Barat. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tingkat keterisian di Hotel Bintang selalu di atas Hotel Non Bintang. Tingkat keterisian untuk Hotel Berbintang di Jawa Barat berada pada rentang 36,22% pada tahun 2020, hingga tertinggi 58,76% pada tahun 2018. Tingkat keterisian hotel Non Bintang di Jawa Barat berada pada rentang terendah pada tahun 2021 dengan 19,54%, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 36,14%.



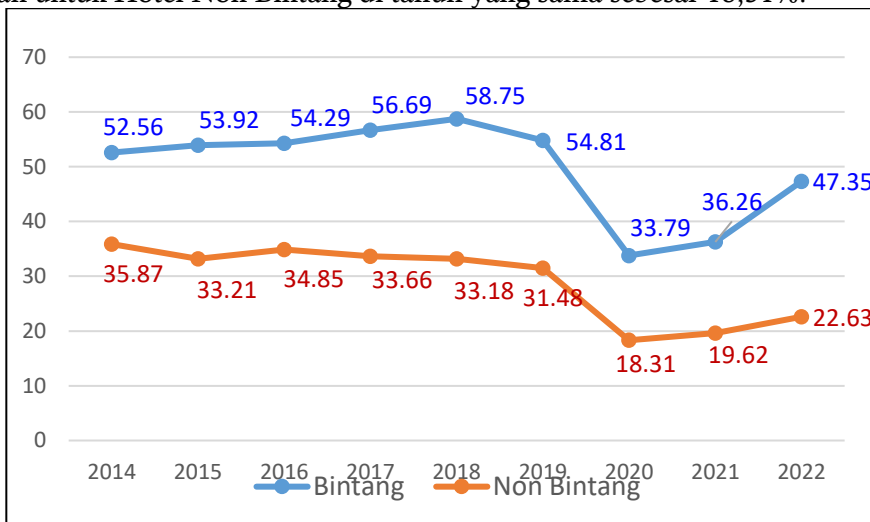
Sumber: BPS Indonesia

Gambar 8. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (*Occupancy Rate*) pada Hotel Bintang dan Non Bintang (persen) di Provinsi Jawa Barat

Dari gambar 8 di atas ternyata terdapat perbedaan tahun antara tingkat keterisian terendah dengan tingkat keterisian tertinggi bila dibandingkan dengan tipe hotel Bintang

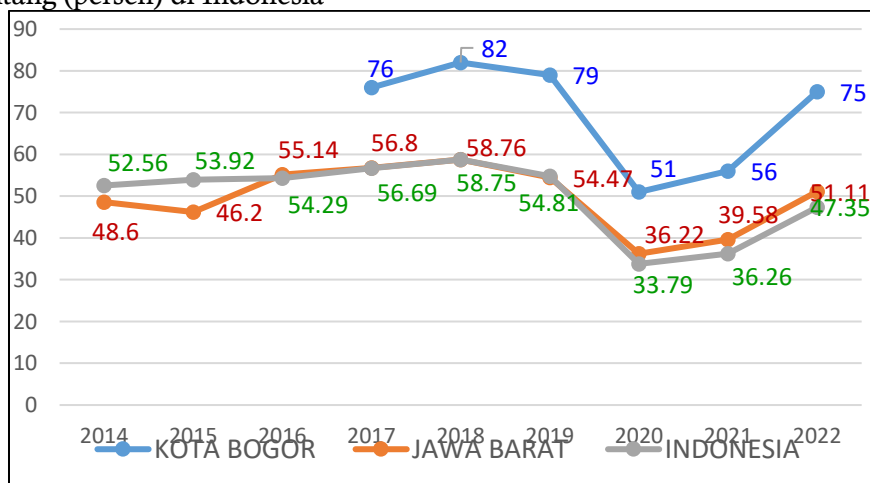
atau Non Bintang. Untuk tingkat keterisian terendah Hotel Bintang di Jawa Barat terjadi pada tahun 2020, sedangkan Hotel Non Bintang tingkat keterisian terendah terjadi setahun kemudian, yaitu 2021. Demikian pula untuk tingkat keterisian tertinggi untuk Hotel Bintang di Jawa Barat terjadi pada tahun 2018, sedangkan untuk Hotel Non Bintang terjadi pada tahun 2017.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi bila melihat data dan gambar 9 untuk tingkat keterisian kamar hotel di Indonesia. Tingkat keterisian kamar hotel tipe Hotel Bintang sejak tahun 2016 hingga 2022 selalu berada di atas Hotel Non Bintang. Tingkat keterisian kamar hotel Bintang tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu 58,75%. Sedangkan Tingkat keterisian Hotel Non Bintang tertinggi terjadi pada tahun 2014 senilai 35,87%. Untuk tingkat keterisian kamar terendah hotel Bintang dan Hotel Non Bintang sama-sama terjadi pada tahun 2020. Tahun tersebut merupakan awal mula Covid-19 menjadi wabah dunia. Tingkat keterisian terendah untuk Hotel Bintang di tahun 2020 sebesar 33,79%, sedangkan untuk Hotel Non Bintang di tahun yang sama sebesar 18,31%.



Sumber: BPS Indonesia

Gambar 9. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (Occupancy Rate) pada Hotel Bintang dan Non Bintang (persen) di Indonesia



Sumber: BPS Indonesia & IHGMA Bogor

Gambar 10. Tingkat Keterisian Kamar Hotel (Occupancy Rate) pada Hotel Bintang (persen) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia

Tingkat keterisian kamar untuk Hotel Bintang dengan membandingkan yang terjadi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia juga menjadi pembahasan dalam paper ini. Hasil dari Analisa tingkat keterisian ketiga lokasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterisian kamar hotel di Kota Bogor berada di atas Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2018 tingkat keterisian kamar hotel Bintang di Kota Bogor tertinggi dengan

nilai 82%. Sedangkan tingkat keterisian hotel Bintang di Kota Bogor terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 51%. Tahun 2020 merupakan tahun awal terjadinya pandemic Covid-19.

PENUTUP

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat keterisian kamar hotel yang puncaknya terjadi pada tahun 2020. Secara umum, tingkat keterisian kamar hotel Berbintang selalu di atas Hotel Non Bintang. Tingkat keterisian kamar hotel di Kota Bogor berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Liew, V. K.-S. (2020). The effect of novel coronavirus pandemic on tourism share prices. *Journal of Tourism Futures*, pp. 1-16.
- Purba, J.H.V., Fathiah, R., Steven, S. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Tourism Sector in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3-1, pp. 389-401
- Škare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2020). Impact of COVID-19 on the Travel and Tourism Industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 120469. Pp. 1-6.

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_commercial_air_transport

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berkala_besar

<https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<https://www.unwto.org/>

<https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/>